

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

(Study Kasus di Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur)

Dedy Abdur Rauf

Mirna Amirya, MSA., Ak., CA., AAP-B., AAP-A.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

E-mail: Dedy.rauf@gmail.com

Abstract

The study aims at analyzing the effect of capital expenditure and local government capital investment on the economic growth as measured by the Regional Gross Domestic Product. The secondary data of such variables are collected from 29 regencies/cities in Banten and NTT Provinces during the period of 2011 up to 2014, which covers 116 observed data. This explanatory research applies multiple regression analysis method. The result of the study shows that capital expenditure has partially given positive and significant effect on the economic growth; on the contrary, the local government capital investment does not influence the economic growth.

Keywords: *Capital Expenditure; Local Government Capital Investment; Economic Growth*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan penyertaan modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data sekunder atas variabel-variabel tersebut berasal dari laporan keuangan 29 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur untuk periode tahun 2011-2014 sehingga jumlah observasi sebanyak 116 pengamatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori dengan menggunakan alat analisis berupa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Belanja Modal, Penyertaan Modal Daerah, Pertumbuhan Ekonomi..

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia setelah merdeka ialah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Kemakmuran ekonomi dari suatu negara dapat terlihat dari tingkat pendapatan perkapita penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita merupakan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara dibagi jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Semakin tinggi pendapatan perkapita yang dimiliki oleh suatu negara mengindikasikan semakin tinggi pula kesejahteraan negara tersebut. Pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dihitung berdasarkan *output* produk yang dihasilkannya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya *output* yang dihasilkan oleh suatu negara berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dalam negara tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan pendapatan bagi masyarakat. Perubahan *output* produksi dalam suatu wilayah dalam sebuah kurun waktu tertentu kemudian disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan kemakmuran suatu negara.

Menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah menurut periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ukuran kuantitatif tersebut dinyatakan dalam sebuah prosentase pendapatan nasional pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan jumlah *output* produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Perkembangan tersebut antara lain penambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah tenaga, penambahan modal dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang positif berarti diharapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengukur kinerja pembangunan perekonomian daerah yang juga berarti meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pertumbuhan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Menurut Adinirekso (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan informasi, nilai upah dan desentralisasi fiskal. Faktor desentralisasi fiskal secara umum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan, khususnya untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Sumatra.

Salah satu indikator perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yaitu besaran pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan model matematika sebagai berikut

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Mengacu pada model tersebut, perekonomian diharapkan tumbuh seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah sebagai komponen pengeluaran (“G”) dan Penyertaan Modal Pemerintah/Investasi sebagai komponen Investasi (“I”) baik itu belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Salah satu bentuk pengeluaran atau belanja pemerintah adalah belanja modal. Belanja modal yaitu Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan bukan untuk dijual.

Menurut Nurjoni (2008) menyatakan bahwa belanja modal utamanya terkait dengan belanja infrastruktur memegang peranan penting dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor infrastruktur dipandang mampu menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mampu mensejahterakan masyarakat.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan model matematika di atas adalah investasi. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang perekonomian biasa disebut sebagai penyertaan modal. Penyertaan modal jika dilakukan oleh pemerintah pusat disebut Penyertaan Modal Negara (PMN) sedangkan jika dilakukan oleh pemerintah daerah disebut Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menambah faktor-faktor produksi sehingga *output* yang dihasilkan menjadi bertambah. Selain itu kenaikan faktor produksi juga dapat berimbas pada berkurangnya angka pengangguran.

Selama ini pemerintah telah berupaya menumbuhkan perekonomian dengan membuat kebijakan prioritas belanja dan/atau pengeluaran yang dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendaapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun sebelum dilakukan penyusunan anggaran tahun berikutnya, Presiden maupun Menteri Keuangan selalu memberikan arahan terkait kebijakan pengeluaran yang diprioritaskan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Dalam proses usaha membangun ekonomi, Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun kedua pemerintah daerah di provinsi tersebut selalu membuat kebijakan pengeluaran prioritas yang ditujukan untuk menaikkan kinerja pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan daerahnya menjadi menarik untuk investor, pengangguran dapat berkurang, kesejahteraan meningkat dan kemiskinan teratasi.

Permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, tentunya dapat diatasi jika pemerintah menerapkan kebijakan pengeluaran anggaran yang tepat. Misalnya dengan menetapkan belanja pegawai tidak boleh melebihi 50% dari total anggaran belanja dan melakukan investasi kepada usaha-usaha yang mampu mendorong ekonomi wilayahnya. Terdapat fenomena terkait dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tergantung pada besarnya alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta, menegaskan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya dapat dipengaruhi oleh faktor pengeluaran PMN pemerintah namun juga dapat datang dari belanja modal atau *capital expenditure* (*capex*) yang dilakukan pemerintah, *capex* BUMN, belanja swasta dan konsumsi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh belanja modal dan penyertaan modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur dipilih karena meskipun kedua provinsi ini merupakan provinsi dengan wilayah yang cukup strategis namun memiliki angka PDRB yang rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tahun 2011 dipilih sebagai tahun awal penelitian karena Badan Pusat Statistik merubah basis harga konstannya dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, sehingga diharapkan data PDRB yang digunakan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk

mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Bapenas, 2003 dalam Harianto dan Adi, 2007). Nilai PDRB mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan perubahan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB (Bappeda Pekanbaru, 2014).

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan perhitungan (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia), yaitu:

1. Pendekatan Produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). ADHB merupakan perhitungan PDRB menggunakan harga berlaku yang masih terpengaruh oleh besaran inflasi dalam menghitung nilai aktivitas ekonomi sementara ADHK menggunakan harga konstan yang biasanya ditetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga harga-harga yang berlaku pada tahun-tahun setelahnya disesuaikan terlebih dahulu dengan tahun dasar dengan menghilangkan pengaruh inflasi dari harga tersebut pada tahun perhitungan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori David Ricardo

Menurut David Ricardo proses dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi antara lain sumber daya tanah, sumber daya manusia, akumulasi kapital, dan

kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo juga akan mengalami titik *stationer* seperti kesimpulan Adam Smith, meskipun untuk mencapai titik tersebut membutuhkan waktu dan proses yang lama. Hal ini disebabkan karena proses pertumbuhan ekonomi mencapai titik *stationer* akan diperlambat oleh akumulasi kapital dan kemajuan teknologi (Candra, 2013). Dalam menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi, David Ricardo menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang terjadi diantara pelaku ekonomi.

b. Teori Solow Swan

Model Solow Swan memusatkan perhatian pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1999).

c. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan penyempurnaan dari teori Keynes. Jika dalam teori Keynes melihat dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan teori Harrod Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Perhatian Harrod Domar dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara keseimbangan antara tabungan, investasi dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi (Candra, 2013).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 dijelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

penggunaan belanja modal antara lain dipergunakan untuk:

1. Belanja modal tanah,
2. Belanja modal peralatan dan mesin,
3. Belanja modal gedung dan bangunan,
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,
5. Belanja modal lainnya, dan
6. Belanja modal badan layanan umum (BLU).

Penyertaan Modal Daerah

Menurut PP No.6 Tahun 2006 Pasal 1 menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara. Selain itu

dijelaskan pula dalam Permendagri No. 52 tahun 2012 bahwasanya penyertaan modal daerah merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah,
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu,
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan,
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah

Metode Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausalitas karena bertujuan untuk menentukan adanya pengaruh antara variabel independen (belanja modal dan penyertaan modal daerah) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hipotesis untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih gejala variabel. Peneliti melakukan pengujian apakah variabel belanja modal dan variabel penyertaan modal daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota serta Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota.

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgement purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria sampel yang diinginkan. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Sampel dibatasi hanya dari data kota/kabupaten di Provinsi Banten dan NTT tahun 2011-2014.
- b) Kota/kabupaten harus sudah berdiri menjadi daerah otonom sebelum tahun 2011 untuk menghindari bias data akibat neraca awal pemerintah daerah.
- c) Data yang diperlukan harus tersedia dan lengkap untuk periode tahun 2011-2014.

Tabel 1.1 Pemilihan Sampel Penelitian

Populasi	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan NTT	30
Kabupaten/Kota yang berdiri sesudah tahun 2011	(1)
Data laporan keuangan tahun 2011-2014 tidak tersedia secara lengkap	-
Sampel yang digunakan	29

Sumber : Data diolah,2017

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

- a) Publikasi Badan Pusat Statistik berupa angka Produk Domestik Regional Bruto.
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berupa realisasi belanja dari laporan keuangan yang telah diaudit.
- c) Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa laporan belanja modal dan penyertaan modal daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, mengunduh dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik pengukuran data yang dilakukan adalah menggunakan model regresi data panel. Data panel merupakan data gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*.

Langkah dalam melakukan penelitian ini diawali dengan melakukan pengujian model yang paling tepat dalam melakukan regresi ini. Pengujian model dilakukan dengan menggunakan uji *chow* dan uji *Haussman*. Setelah model yang tepat diketahui berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji statistik yang terdiri dari uji F dan uji-t.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian model

Berdasarkan hasil uji *chow* yang ditunjukkan pada tabel 1.2 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section F* dan *cross-section chi-square* bernilai 0,00 atau lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan model *common effect*.

Tabel 1.2 Hasil uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	399.029343	(28,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	566.795391	28	0.0000

Sumber : Data sekunder diolah dengan program Eview 9

Sedangkan berdasarkan uji *Hausman*, yang ditunjukkan pada tabel 1.3 diketahui bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,00 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05, dengan demikian uji *chow* dan uji *Hausman* sepakat bahwa metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode *fixed effect*.

Tabel 1.3 Hasil uji Hausman Test

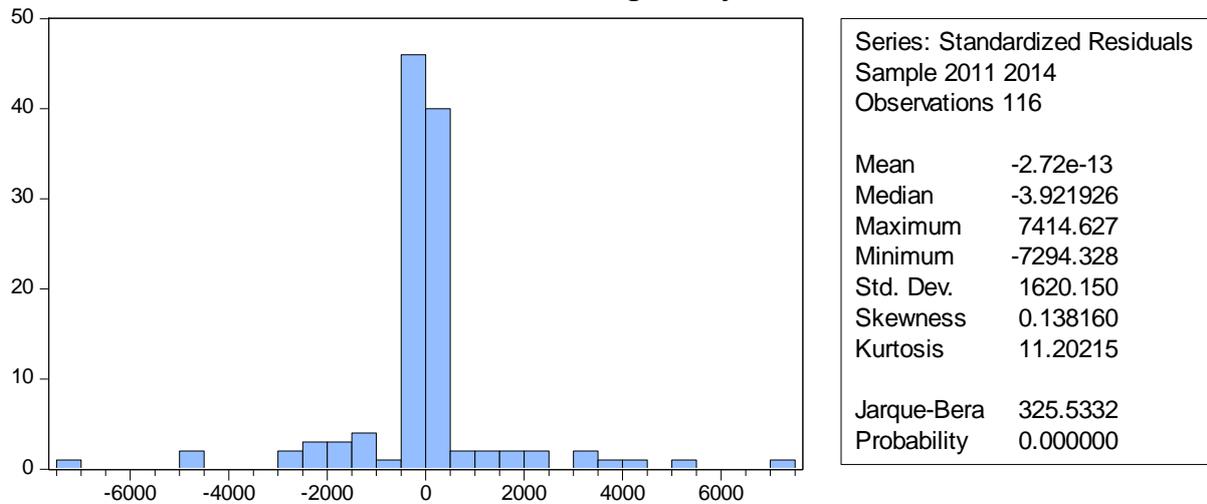
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.050207	2	0.0000

Sumber : Data sekunder diolah dengan program Eview 9

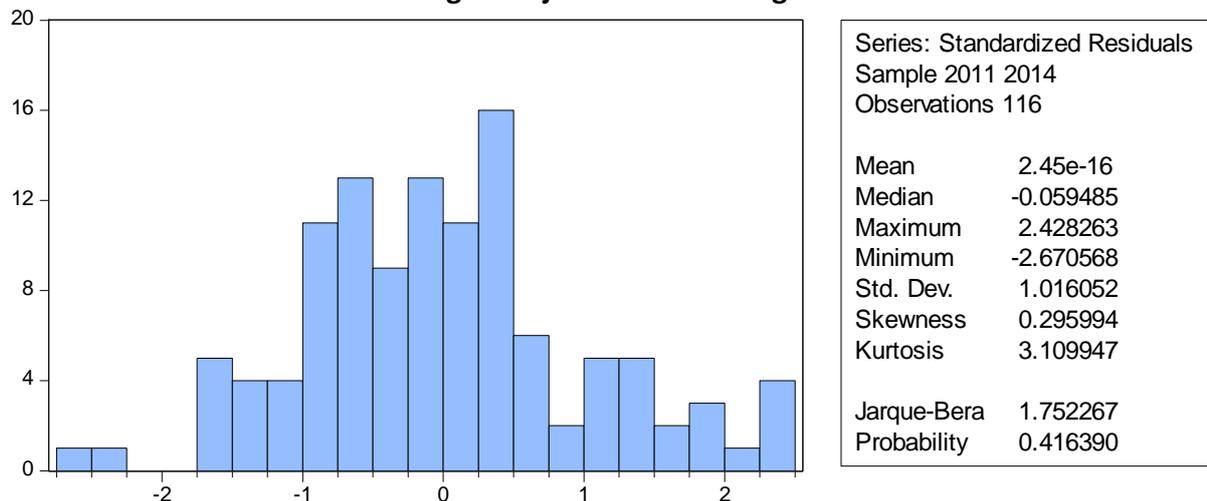
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Dengan uji normalitas diketahui bahwasanya data yang dimiliki tidak terdistribusi secara normal (Gambar 1.1). Sehingga data perlu dirubah dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) agar dapat diolah lebih lanjut. Setelah dirubah dalam bentuk Ln, didapatkan hasil data yang terdistribusi normal (Gambar 1.2). Dengan data yang terdistribusi normal maka pengujian dilanjutkan dengan Uji Regresi.

Gambar 1.1 Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.5 Histogram Uji Normalitas dengan data berbentuk LN



Hasil Pengujian Statistik

Pengujian statistik menghasilkan bahwa berdasarkan uji F diketahui bahwasanya kedua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Menurut uji-t diketahui bahwasanya variabel belanja modal secara individu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Realisasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2014

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan pada tabel 1.4 diperoleh nilai probabilitas kontribusi Belanja Modal adalah sebesar 0,0004. Dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menerima H_a . Hal ini berarti variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 1.4 Hasil Regresi Model *Fix Effect*

Dependent Variable: LNPE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/28/17 Time: 09:21

Sample: 2011 2014

Included observations: 4

Cross-sections included: 29

Total pool (balanced) observations: 116

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNBM?	0.002089	0.000567	3.683101	0.0004
LNPM?	0.013918	0.045763	0.304122	0.7618
C	12318.81	246.5931	49.95603	0.0000
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994154	Mean dependent var	12858.98	
Adjusted R-squared	0.992090	S.D. dependent var	21188.98	
S.E. of regression	1884.495	Akaike info criterion	18.14425	
Sum squared resid	3.02E+08	Schwarz criterion	18.88012	
Log likelihood	-1021.367	Hannan-Quinn criter.	18.44297	
F-statistic	481.7931	Durbin-Watson stat	0.957023	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data sekunder diolah dengan program Eview 9

Kemudian pola hubungan Belanja Modal dalam model estimasi adalah positif (+), berarti Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai nol, maka setiap kenaikan satu persen belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah maka akan menyebabkan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,002 poin.

Hal ini sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah terutama belanja modal memiliki pengaruh terhadap kenaikan output produksi yang akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan fungsi alokasi anggaran, pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja modal yang mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap ekonommi.

Pengaruh positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat dari kenaikan PDRB yang ada di Provinsi Banten dan NTT. Dalam kurun waktu 2011-2014 PDRB menurut ADHK di Provinsi Banten dan NTT mengalami peningkatan.

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh hasil penelitian Brata (2004) yang menyatakan bahwa variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal yang dikeluarkan pemerintah memiliki

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya antara lain berupa belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Dengan peningkatan infrastruktur yang ada akan mempermudah proses distribusi hasil produksi wilayah tersebut. Selain itu dengan belanja modal berupa gedung dan bangunan maka akan memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan publik yang baik dan cepat maka masyarakat dapat berfokus pada usaha peningkatan produksinya.

Pengaruh Realisasi Penyertaan Modal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2014

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan pada tabel 1.4 diperoleh nilai probabilitas realisasi Penyertaan Modal Daerah adalah sebesar 0,7618. Dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang diambil adalah menerima H_0 atau hal ini menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena rasio penyertaan modal daerah yang tidak terlalu besar. Selain itu, motif penyertaan modal daerah dilakukan lebih banyak dikarenakan untuk membantu pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Hal ini berarti berarti semakin besar belanja modal yang dikeluarkan pemerintah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah telah dialokasikan secara efektif sehingga hasil dari belanja modal tersebut dapat dinikmati dalam kurun waktu pendek.
2. Variabel Penyertaan modal daerah secara empiris tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah realisasi penyertaan modal daerah yang kecil. Selain itu penyertaan modal daerah lebih digunakan untuk melakukan pembiayaan untuk membantu permodalan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Data Keuangan Daerah. DJPK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.* 2012. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006> (diakses 7 November 2016).
- Adinirekso, G. 2001. *Dampak Ekspor terhadap Produk Nasional Bruto dan Komponennya.* Paper Ekonometrika I. Jakarta: LPFE-UI.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE-UGM
- Candra, Eddy Wibiwo. 2013. *Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010.* Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita.* *Simposium Nasional Akuntansi X.* Makassar.
- Nurjoni. 2008. *Outlook Pembangunan Infrastruktur 2008, Mengguyur Dana, Menggapai Asa.* Investor Daily. <http://madani-ri.com/web/?p=167>. (diakses 7 November 2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: LPFE-UI.